

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan pendapatan merupakan dua tujuan yang saling terkait dan idealnya harus dicapai secara bersamaan. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat harus dibarengi dengan pemerataan ekonomi agar manfaat dari hasil pembangunan bisa di rasakan oleh semua kalangan (Nursyahfitri et al., 2025).

Fenomena permasalahan yang sering ditemukan di Negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yaitu ketidaksetaraan ekonomi, tercermin dalam distribusi pendapatan yang tidak merata sebanyak 40% masyarakat berpenghasilan tinggi, 40% berpenghasilan menengah, dan 20% berpenghasilan rendah. Terjadinya ketimpangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan, kebijakan fiskal terutama yang berkaitan dengan perpajakan ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kondisi pasar tenaga kerja, serta distribusi pendapatan yang tidak merata di dalam masyarakat (Tambunan dalam Ariadi, 2020).

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat dinilai melalui perubahan struktur ekonomi, peningkatan pembangunan ekonomi, dan berkurangnya secara bertahap ketimpangan pendapatan di antara penduduk, antardaerah, dan lintas sektor. Perekonomian dikatakan tumbuh jika tingkat aktivitas ekonominya lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Dalam

konteks ini, pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam output per kapita dalam jangka panjang. Namun, para ekonom berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Produk Domestik Bruto (PDB), pembangunan juga harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana tercermin dalam rasa aman dan nyaman, serta meningkatnya tingkat kepuasan dan kesejahteraan yang dirasakan secara luas (Ariadi, 2020).

Pertumbuhan GNP per kapita yang tinggi tidak selalu berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam praktiknya, manfaat pertumbuhan ekonomi seringkali tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme trickle down effect, yaitu penyebaran manfaat pertumbuhan ekonomi dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok berpenghasilan rendah tidak selalu berjalan sesuai harapan (Daniel, 2019).

Ketimpangan pembangunan di negara Indonesia terjadi karena adanya perbedaan kondisi antar daerah seperti sumber daya alam, jumlah penduduk, serta akses terhadap mobilitas barang dan jasa. Selain itu, faktor sosial dan politik juga ikut memengaruhi terjadinya ketimpangan.

Di Kota Banjarmasin, perkembangan ekonomi terlihat lebih cepat pada beberapa sektor perdagangan dan jasa, tetapi masih terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan di masyarakat. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh

mekanisme pasar dan kualitas tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang berbeda-beda. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan manfaat yang sama bagi semua lapisan masyarakat.

Masalah angkatan kerja yang belum terserap secara optimal juga masih menjadi persoalan ekonomi hingga saat ini. Terbatasnya lapangan pekerjaan membuat sebagian masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Di sisi lain, kualitas sumber daya manusia juga menjadi tantangan, karena tidak semua tenaga kerja memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya pengangguran dan ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat.

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika pendapatan yang diterima masyarakat tidak tersebar secara merata. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pembangunan daerah, keberagaman kondisi sosial masyarakat, hingga kebijakan pemerintah yang kurang mampu melindungi hak kepemilikan (*property rights*). Akibatnya, sebagian masyarakat memperoleh pendapatan yang tinggi, sementara sebagian lainnya masih berada pada tingkat pendapatan yang rendah (Glaeser, 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ketidaksetaraan adalah kondisi yang menandakan adanya ketidakseimbangan atau situasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketidaksetaraan dapat dipahami sebagai adanya perbedaan yang menimbulkan kesenjangan di dalam suatu

kelompok sosial. Kondisi ini umumnya terjadi karena akses terhadap sumber daya yang tersedia tidak didistribusikan secara merata di antara individu atau kelompok. Selain itu, kebijakan yang tidak mengutamakan keadilan juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya ketidaksetaraan di masyarakat (Ali et al., 2025).

Dalam Islam, konsep keadilan ('adl) dan pemerataan rezeki menjadi prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ ذُوْلَةٌ بَيْنَ الْأَعْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اتَّكُمْ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Semua harta benda yang Allah SWT beri ke para Nabi dan Rasul nya pada suatu wilayah yang tidak ada perang, dipergunakan untuk Allah SWT, Rasul, Keluarga Rasul, para anak yatim, orang orang miskin dan musafir. Pembagian ini ditujukan supaya harta tidak hanya berada di orang kaya saja. Segala sesuatu yang diberikan terimalah dengan berlapang hati dan menjauhi segala larangannya, Bertakwalah kepada Allah SWT, sungguh azab nya sangatlah berat.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa dalam ajaran Islam, kekayaan tidak boleh hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Islam menekankan pentingnya pemerataan ekonomi, agar semua orang bisa mendapatkan bagian secara adil dan merata. Selain itu, Islam sangat memperhatikan kesejahteraan orang miskin dan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan melalui kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.

Ketimpangan pendapatan menjadi salah satu indikator penting untuk melihat tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa adil pendapatan dapat dirasakan oleh masyarakat (Cypher & Dietz, 2008). Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan adanya pemerataan kesejahteraan, karena manfaat pertumbuhan tersebut sering kali lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan dalam pembangunan ekonomi, termasuk di Kota Banjarmasin. Sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin mengalami perkembangan ekonomi yang cukup baik dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat telah dirasakan secara merata.

Perkembangan ekonomi di Kota Banjarmasin telah menunjukkan kemajuan yang cukup positif, terutama di sektor infrastruktur, perdagangan, dan jasa. Namun, pertumbuhan ini belum tentu disertai dengan pemerataan pendapatan yang dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Di sisi lain, masalah tenaga kerja yang kurang dimanfaatkan tetap menjadi tantangan bagi perekonomian daerah. Situasi ini dipengaruhi oleh terbatasnya ketersediaan lapangan kerja serta kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, sebagian tenaga

kerja masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kehidupan masyarakat.

Data dibawah merupakan data Gini Ratio Kota Banjarmasin yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Banjarmasin.

Tabel 1. 1 Tingkat Rasio Gini di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Tahun	Ketimpangan Pendapatan (%)
2017	0,33
2018	0,38
2019	0,33
2020	0,34
2021	0,35
2022	0,33
2023	0,37
2024	0,35

Sumber: BPS Rasio Gini Kota Banjarmasin 2017-2024

Dari tabel di atas Rasio Gini Kota Banjarmasin dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi, setiap tahunnya data mengalami naik turun, tentu saja hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan. Secara keseluruhan, pergerakan Rasio Gini selama periode tersebut memperlihatkan pola naik turun tanpa tren penurunan atau peningkatan yang konsisten, mencerminkan dinamika ketimpangan pendapatan yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Pola ini menunjukkan bahwa permasalahan ketimpangan pendapatan di Kota Banjarmasin masih bersifat dinamis dan belum tertangani secara optimal. Fluktuasi Rasio Gini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin belum sepenuhnya diiringi pemerataan pendapatan, sehingga diperlukan analisis faktor-faktor yang memengaruhinya.

Tabel 1. 2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2017	6,40
2018	6,38
2019	6,09
2020	-1,88
2021	3,41
2022	5,69
2023	5,62
2024	5,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarmasin 2017-2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kota Banjarmasin selama periode 2017-2024 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Dari tahun 2017 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi sebesar -1,88%, dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Setelah itu, ekonomi mulai pulih pada tahun 2021. Meningkat signifikan menjadi 5,69% pada tahun 2022. Pada periode 2023-2024, pertumbuhan ekonomi kembali stabil. Secara keseluruhan data menunjukkan bahwa ekonomi Banjarmasin telah berhasil pulih dari dampak pandemi dan kembali ke pertumbuhan positif dengan tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. 3 Persentase Penduduk Miskin (P0) di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	4,19
2018	4,18

2019	4,20
2020	4,39
2021	4,89
2022	4,74
2023	4,63
2024	4,58

*Sumber: Badan Pusat Statistik Persentase Penduduk Miskin (P0)
Kota Banjarmasin 2017-2024*

Pada tabel diatas menampilkan penduduk miskin di Kota Banjarmasin relatif stabil di angka 4,18-4,20% pada tahun 2017-2019, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabilitas harga. Pada tahun 2020-2021, angka kemiskinan meningkat dari 4,39% menjadi 4,89% akibat dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi, berkurangnya kesempatan kerja, dan penurunan pendapatan. Memasuki tahun 2022-2024, angka kemiskinan secara bertahap menurun. Penurunan ini didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa, program bantuan sosial pemerintah, serta peningkatan kesempatan kerja dan daya beli. Selain itu, pertumbuhan investasi dan pembangunan di Kalimantan juga memberikan dampak positif pada perekonomian daerah.

Tabel 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banjarmasin Tahun 2017-2024

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2017	8,87
2018	8,01
2019	7,49
2020	8,32
2021	8,47
2022	6,96
2023	6,70

2024	6,56
------	------

Sumber: Badan Pusat Statistik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banjarmasin 2017-2024

Berdasarkan data dari tabel Badan Pusat Statistik (BPS) diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Banjarmasin menunjukkan tren penurunan jangka panjang. Pada tahun 2017-2019, TPT turun dari 8,87% menjadi 7,49%, seiring pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja baru. Namun, pada tahun 2020-2021, tingkat pengangguran naik menjadi 8,32% dan 8,47% akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak bisnis melakukan PHK dan mengurangi aktivitas ekonomi. Tahun 2022-2024 TPT kembali menurun secara konsisten. Penurunan ini didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa, peningkatan kesempatan kerja, dan dukungan dari program pemerintah untuk pemulihan lapangan kerja. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin menunjukkan peningkatan berkelanjutan setelah dampak pandemi.

Banjarmasin sebagai salah satu kota utama di Provinsi Kalimantan Selatan di sisi pembangunan ekonomi nya yang terus berjalan. Dalam sektor infrastruktur, jasa, perdagangan yang terus berkembang, hal tersebut nyatanya tidak berbanding dengan belum meratanya pendapatan yang adil. Pada sudut yang berbeda, pada masa akan datang tingkat kemiskinan serta pengangguran harus tetap konsisten kestabilannya dan akan terus menjadi rintangan pemerintah daerah dalam konteks sosial ekonomi.

Penelitian sebelumnya banyak membahas pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan skala tingkat nasional seperti yang dilakukan oleh (Dinda Syahrir, 2020). Namun, sedikit penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di tingkat daerah. Banjarmasin dengan karakteristik sosial ekonomi yang unik dan budaya yang kuat, memerlukan kajian spesifik yang dapat mengungkap bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan daerah secara empiris. Gap ini muncul karena sebagian besar literatur berfokus pada kawasan nasional, sementara daerah seperti Kota Banjarmasin belum ada.

Di sisi lain, penelitian mengenai tingkat pengangguran terbuka lebih sering berfokus pada pengaruhnya terhadap variabel makroekonomi seperti Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Penduduk Miskin, Upah Minimum, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum, 2017). Namun, kajian yang mengintegrasikan variabel pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka dalam satu model untuk memahami pengaruh simultannya terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat daerah masih sangat jarang ditemukan.

Berdasarkan fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disajikan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul “ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P0) DAN TINGKAT

PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KOTA BANJARMASIN PADA PERIODE 2017-2024”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan bahwa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah Variabel Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin (P0), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin Pada Periode 2017-2024?
2. Apakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin (P0), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berpengaruh Secara Parsial Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin Pada Periode 2017-2024?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, bisa disimpulkan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Simultan Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin (P0), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin Pada Periode 2017-2024.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Parsial Variabel Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Penduduk Miskin (P0), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Banjarmasin Pada Periode 2017-2024.

D. Signifikansi Penelitian

Tidak hanya mempunyai tujuan yang mau dicapai, peneliti berharap penelitian ini dapat berdampak positif, dari sisi pengembangan teori ataupun menerapkannya secara langsung di kehidupan sehari-hari.

1. Teoritis

Harapan peneliti, penelitian ini dapat menjadi rujukkan informasi ilmiah yang bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan, untuk penulis ataupun viewers, khusus keterkaitan dengan variabel pengaruh pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin (P0), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap ketimpangan pendapatan. Peneliti juga berharap, penelitian ini bisa memiliki sumbangsih pemikiran guna memperkaya bacaan di Universitas Negeri Antasari. Dan juga harapannya penelitian ini dapat menjadi patokan untuk stakeholders serta sumber bagi peneliti yang akan datang yang ingin mengangkat topik serupa dari POV yang berbeda.

2. Praktisi

Penelitian ini memiliki signifikansi praktis yang penting, terutama bagi pemerintah daerah, untuk memahami bagaimana pengaruh

pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin (P0), dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan. Peneliti berharap, penelitian ini bisa memberikan sumbangsih wawasan yang bermanfaat ke pemerintah daerah guna merancang strategi serta kebijakan yang lebih efektif sesuai dengan urgensi masalah yang dihadapi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai isi skripsi ini, diperlukan penyajian sistematika penulisan yang berperan sebagai kerangka dan panduan dalam penyusunan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal terdiri atas halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman pernyataan keaslian karya tulis, halaman bukti bebas plagiasi, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, serta halaman transliterasi.

2. Bagian Utama Skripsi

Bagian utama karya ilmiah disusun ke dalam beberapa bab dan subbab diantaranya **BAB I PENDAHULUAN** memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi atau manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. **BAB II LANDASAN TEORI** berisi kajian teori yang relevan, penelitian terdahulu yang berkaitan,

kerangka pikir penelitian, serta hipotesis yang diajukan. **BAB III METODE PENELITIAN** menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, desain operasional variabel, teknik analisis data, serta tahapan penelitian. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** menyajikan hasil penelitian beserta analisisnya. Penyajiannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam bagian hasil penelitian dan pembahasan. **BAB V PENUTUP** berisi simpulan dan saran yang diperoleh dari keseluruhan proses penelitian. Simpulan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas sebagai jawaban atas rumusan masalah atau fokus penelitian. Sementara itu, saran memuat rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis, serta usulan perbaikan yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan terkait.